



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SYIAH KUALA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **M. GAUSSYAH**
2. Jabatan : **DEKAN FAKULTAS HUKUM**
3. NHK : **683237**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 5.150.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 481 m²/400 m² di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 2.750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 251 m²/200 m² di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
3. Tanah Seluas 500 m² di KAB / KOTA ACEH UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
4. Tanah Seluas 2000 m² di KAB / KOTA PIDIE, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 17800 m²/70 m² di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
6. Tanah Seluas 500 m² di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 17000 m²/30 m² di KAB / KOTA ACEH JAYA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 162.500.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 FI Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000



4. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 FI Tahun 2008, HASIL SENDIRI
Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 975.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 458.031.745

F. HARTA LAINNYA Rp. 150.000.000

Sub Total Rp. 6.895.531.745

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.895.531.745

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.